

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN
HUKUM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT TERHADAP
TRADISI BERBURU IKAN PAUS DI KABUPATEN LEMBATA DITINJAU
DARI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN PENCEMARAN, PENCEGAHAN KERUSAKAN,
REHABILITASI DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA IKAN DAN
LINGKUNGAN LAUT**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

NIKOLAUS VALENTINO BOLI TUKAN
NIM. 2021110067

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN
HUKUM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT TERHADAP
TRADISI BERBURU IKAN PAUS DI KABUPATEN LEMBATA DITINJAU
DARI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG
PENCEGAHAN PENCEMARAN, PENCEGAHAN KERUSAKAN,
REHABILITASI DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA IKAN DAN
LINGKUNGAN LAUT**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH

NIKOLAUS VALENTINO BOLI TUKAN

NIM. 2021110067

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum

NIDN : 0829057601

Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H

NIDN: 0808087301

Mengetahui:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**

Christina Bagenda, S.H.,M.H

NIDN: 0823036701

Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum

NIDN: 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN
HUKUM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT
TERHADAP TRADISI BERBURU IKAN PAUS DI KABUPATEN
LEMBATA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN
2021 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN, PENCEGAHAN
KERUSAKAN, REHABILITASI DAN PENINGKATAN SUMBER
DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN LAUT**

Disusun Dan Diajukan Oleh

Nikolaus Valentino Boli Tukan
NIM. 2021110067

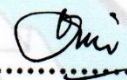
Telah Diuji Dan Dipertanggungjawabkan Didepan dewan Penguji Skripsi pada:

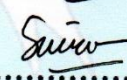
Hari : Jumad

Tanggal : 29 Agustus 2025

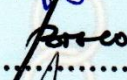
Tim Penguji

1. Christina Bagenda, S.H.,M.H
(Ketua Penguji)
2. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum
(Sekretris Penguji)
3. Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
(Anggota)
4. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H
(Anggota)
5. Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum
(Anggota)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES**


Christina Bagenda, S.H.,M.H
NIDN : 0823036701

**KETUA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES**


Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum
NIDN : 0812117801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nikolaus Valentino Boli Tukan
Nim : 2021110067
Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora
Perguruan tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Peran Pemerintah Dalam Mengeluarkan Kebijakan Hukum Tentang Pelestarian Lingkungan Laut Terhadap Tradisi Berburu Ikan Paus Di Kabupaten Lembata Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi Dan Peningkatan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungan Laut”**, dengan ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang rujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi atas perbuatan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ende, 25 Agustus 2025



Nikolaus Valentino Boli Tukan
2021110067

MOTTO

"Di ombak bergelora, tradisi bersemi; di hukum yang kokoh,
kelestarian abadi."

(Nikolaus Valentino Boli Tukan)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Tuhan yang maha Esa dengan segala rahmat serta karunianya yang berlimpah sehingga diberikan kekuatan dan kemudahan bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Skripsi ini Peneliti persembahkan untuk cinta pertama pintu surgaku, Mama Maria Ela terima kasih yang sebesar -besarnya peneliti ucapkan untuk mama atas segala bentuk doa, motivasi, semangat, pengorbanan dan cinta kasih yang selalu diberikan kepada peneliti, terima kasih atas segala bentuk doa dan nasihat yang diberikan, atas kesabaran dan kebesaran hati untuk menghadapi peneliti ini, mama adalah sosok penguat dan pengingat paling hebat, terima kasih sudah menjadi rumah untuk tempat peneliti pulang, peneliti persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk Mama tercinta.
3. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk Alm. Bapak Lengari Pius Tukan yang selalu ada dalam hatiku, walupun Bapak sudah tidak ada disaat saya sampai di titik ini, Namun Bapak yang telah memberikan nasihat agar menjadi manusia yang sukses dan rendah hati kelak, Skripsi ini peneliti persembahkan untuk Bapak tercinta di surga dan menjadi bukti bahwa penulis mampu mencapai cita cita tanpa harus bergantung pada orang lain.
4. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk Kakak Ansi, Rino, dan Riko tersayang terima kasih untuk segala cinta, doa, dan dukungan yang selalu kalian berikan untuk saya, kalian adalah sumber semangat untuk saya terus belajar dan meraih cita-cita.
5. Kepada Almamater tercinta, Universitas Flores Terlebih Khusus Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama peneliti mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dimana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, sehingga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntutan dan anugerah sang pencipta yang patut peneliti syukuri sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Peran Pemerintah Dalam Mengeluarkan Kebijakan Hukum Tentang Pelestarian Lingkungan Laut Terhadap Tradisi Berburu Ikan Paus Di Kabupaten Lembata Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi Dan Peningkatan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungan Laut”** yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Flores.

Namun demikian peneliti sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga peneliti banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang peneliti tuju kepada:

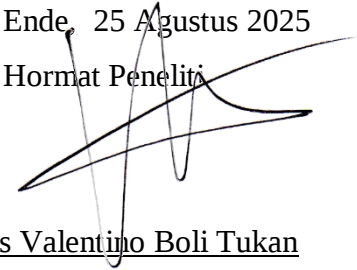
1. Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Flores (YAPERTIF), Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt, yang sudah berjuang dan memberikan kontribusi yang luar biasa untuk memajukan pendidikan di Universitas Flores.
2. Rektor Universitas Flores, Bapak Dr. Wilybrodus Lanamana, S.E., M.M.A, yang telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.
3. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora dan banyak memberikan masukan bagi peneliti, dan juga mendorong peneliti untuk selalu semangat menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S.Fil., M.Hum, sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.

5. Ibu Ernesta Arita Ari S.H.,M.Hum, selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Keuangan, dan Kepegawaian yang dengan tulus Ikhlas mengarahkan, membimbing sekaligus memberikan semangatke pada kami semua dalam mengerjakan tugas akhir ini.
6. Ibu Gratiana Sama S.Pd.,M.Hum, selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
7. Bapak Dr. Alfonsus Fa, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I yang selama ini dengan hati yang tulus terus mendorong kami anak-anaknya, untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.
8. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing II yang selama ini dengan hati yang tulus terus mendorong peneliti untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu.
9. Bapak Hendrikus Haipon S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
10. Ibu Sumirahayu Sulaiman S.H, M.Hum. selaku Sekretaris Programstudi Ilmu Hukum.
11. Dosen program studi Ilmu Hukum, yang dengan sabar dan semangat membagikan ilmu dan pengetahuannya bagi kami semua. Kami tidak bisa membalas jasa Bapak/Ibu dosen, hanya seuntai doa yang kami panjatkan untuk Bapak dan Ibu Dosen semuanya, semoga diberikan kesehatan dan limpahan rejeki yang baik.
12. Ibu Kristina Bunga S.H selaku Kepala Tata Usaha Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, yang selama ini banyak membantu dan melancarkan proses administrasi dan juga selalu memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
13. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Sosial dan Humaniora, yang selama ini melayani dan juga membantu kami dalam proses administrasi dengan baik dan tulus ikhlas.
14. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya Akademisi Hukum, dan teman-teman yang

berkecimpung dalam bidang hukum, sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah keilmuan, khususnya Ilmu Hukum.

Ende, 25 Agustus 2025

Hormat Peneliti

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Nikolaus Valentino Boli Tukan

NIM. 2021110067

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Ruang Lingkup Masalah.....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian	9
1.6. Lokasi Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Penulisan	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 15

2.1. Pengertian Peran Pemerintah 15

2.1.1 Pengertian Peran.....15

2.1.2 Pengertian Peran Pemerintah.....15

2.2. Kebijakan Legislasi 17

2.2.1 Pengertian Kebijakan17

2.2.2 Pengertian Kebijakan Legislasi17

2.3. Pelestarian Lingkungan Laut 19

2.3.1 Pengertian Pelestarian19

2.3.2 Pengertian Pelestarian Lingkungan Laut19

**BAB III PERAN PEMERINTAH DALAM MENGELUARKAN
KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PELESTARIAN
LINGKUNGAN LAUT TERHADAP TRADISI BERBURU IKAN
PAUS DI KABUPATEN LEMBATA. SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021
..... 22**

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Lembata.....22

3.2 Perburuan Ikan Paus Di Desa Lamalera.....24

3.2.1 Perburuan Ikan Paus Dalam Tradisi.....24

3.2.2 Perburuan Ikan Paus Di Luar Tradisi.....27

3.3	Dampak Lingkungan terhadap Perburuan Ikan Paus di Desa Lamalera	29
3.4	Peran Pemerintah Kabupaten Lembata dalam Mengeluarkan Kebijakan Hukum tentang Pelestarian Lingkungan Laut.....	32
3.4.1	Amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.....	32
3.4.2	Upaya Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA)	36
BAB IV	FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PEMERINTAH DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT TERHADAP TRADISI BERBURU IKAN PAUS DI KABUPATEN LEMBATA	40
4.1	Kuatnya Tradisi Adat Lamalera tentang Perburuan Ikan Paus.....	40
4.2	Sulitnya Melakukan Pendekatan atau Negosiasi dengan Lembaga Adat	43
4.3	Dominasi/Penolakan Dari Masyarakat Terkait Kebijakan Pemerintah	45
4.4	Loyalitas Ganda Antara Kepentingan Adat dan Pemerintah	47
4.5	Belum Adanya Kesepakatan Antara Masyarakat dan Pemerintah yang Membuat Peraturan Daerah Tersebut Belum Disahkan	49
4.6	Keterbatasan Anggaran Yang Dibutuhkan Dalam Proses Pengesahan Peraturan Daerah	50
4.7	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah	52
BAB V	PENUTUP	55
5.1.	Kesimpulan	55

5.2. Saran	56
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGELUARKAN KEBIJAKAN HUKUM TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT TERHADAP TRADISI BERBURU IKAN PAUS DI KABUPATEN LEMBATA DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN, PENCEGAHAN KERUSAKAN, REHABILITASI DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN LAUT

disusun oleh
Nikolaus Valentino Boli Tukan
Nim: 2021110067

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Sosial Humaniora, Universitas
Flores-Ende, 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Lembata dalam mengeluarkan kebijakan hukum mengenai pelestarian lingkungan laut terhadap tradisi berburu ikan paus di Desa Lamalera, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang pencegahan pencemaran, pencegahan kerusakan, rehabilitasi, dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui pengumpulan data primer dari wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Leva Nuang* di Lamalera memiliki nilai budaya dan kearifan lokal yang tinggi, diatur oleh hukum adat yang ketat seperti larangan memburu paus betina, paus muda, dan penggunaan alat modern. Pemerintah daerah telah berupaya merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) berbasis kearifan lokal untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan perlindungan ekosistem laut. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai hambatan, antara lain kuatnya pengaruh hukum adat, sulitnya negosiasi dengan lembaga adat, penolakan sebagian masyarakat terhadap intervensi pemerintah, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya pemahaman masyarakat terkait dampak ekologis perburuan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pelestarian lingkungan laut di Lembata sangat bergantung pada pendekatan dialogis, partisipatif, dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya. Regulasi yang dihasilkan perlu bersifat adaptif terhadap kearifan lokal agar tradisi berburu paus dapat terus berlangsung tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem laut.

Kata kunci: Peran Pemerintah, Kebijakan Hukum, Pelestarian Lingkungan Laut, Tradisi Berburu Paus, Lamalera.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN FORMULATING LEGAL POLICIES ON MARINE ENVIRONMENTAL PRESERVATION IN RELATION TO THE TRADITIONAL WHALE-HUNTING PRACTICE IN LEMBATA REGENCY VIEWED FROM THE REGULATION OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 26 OF 2021 CONCERNING THE PREVENTION OF POLLUTION, PREVENTION OF DAMAGE, REHABILITATION, AND ENHANCEMENT OF FISH RESOURCES AND THE MARINE ENVIRONMENT

Compiled By
Nikolaus Valentino Boli Tukan
NIM: 2021110067

Law Study Program, Faculty of Law and Social Humanities, University of Flores-
Ende, 2025

This study aims to analyze the role of the Lembata Regency Government in formulating legal policies for the preservation of the marine environment in relation to the traditional whale-hunting practice in Lamalera Village, in accordance with the provisions of the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia Number 26 of 2021 concerning the prevention of pollution, prevention of damage, rehabilitation, and enhancement of fish resources and their marine environment. The research employs an empirical legal method with a juridical-sociological approach, collecting primary data through interviews and field observations, and secondary data through literature review and document analysis. The findings reveal that the *Leva Nuang* tradition in Lamalera holds high cultural value and local wisdom, governed by strict customary law, such as the prohibition of hunting female and juvenile whales and the use of modern equipment. The local government has initiated the drafting of a Local Regulation (Ranperda) based on local wisdom to balance cultural preservation and marine ecosystem protection. However, the implementation of this policy faces various challenges, including the strong influence of customary law, difficulties in negotiating with customary institutions, community resistance to government intervention, limited resources, and low public awareness regarding the ecological impacts of whale hunting. This research concludes that the success of marine environmental preservation in Lembata greatly depends on a dialogical, participatory, and collaborative approach between the government, customary communities, and other stakeholders. The resulting regulations must be adaptive to local wisdom to ensure that the whale-hunting tradition can continue without threatening the sustainability of the marine ecosystem.

Keywords: Government Role, Legal Policy, Marine Environmental Preservation, Whale-Hunting Tradition, Lamalera.